

**PENGHINDARAN HUKUM
DALAM *LEVERAGE MODEL*: STUDI PEMISAHAN UNIT
USAHA SYARIAH**



Oleh:

NINA RATNASARI

NIM: C. 100.160.152

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGHINDARAN HUKUM
DALAM *LEVERAGE MODEL*: STUDI PEMISAHAN UNIT USAHA
SYARIAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

NINA RATNASARI

C.100.160.152

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wardah Yuspin', with a large loop at the end.

(Wardah Yuspin, Ph. D)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGHINDARAN HUKUM DALAM *LEVERAGE MODEL*: STUDI PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Oleh :
NINA RATNASARI
C.100.160.152

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 14 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Wardah Yuspin, Ph. D
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S. H., M. Hum.)

Dr. KELIK WARDIONO, S.H., M.H.
NIP. 19681226 199303 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 November 2018

Yang membuat pernyataan



(Nina Ratnasari)

C.100.160.152

PENGHINDARAN HUKUM DALAM *LEVERAGE MODEL* : STUDI PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Office Channeling* dan *Delivery Channel* yang ada pada Bank Umum Konvensional. Kemudian pelaksanaan *Leverage Model* yang diusulkan pada Unit Usaha Syariah pada BPD DIY Syariah. Dan apakah *Leverage Model* tergolong sebagai upaya perbuatan penghindaran hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan empiris. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data dengan data wawancara disertai peraturan perundang – undangan terkait. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku perbankan syariah pada perbankan syariah. Metode analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan berpedoman ada peraturan perundang – undangan, prinsip syariah, yurisprudensi dan doktri yang dikombinasikan dengan hasil data yang diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Di dapatkan hasil bahwa BPD DIY Syariah melaksanakan *Office Channeling* sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang – undangan. Karena BPD DIY Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Artinya, BPD DIY Syariah tidak menerapkan *Delivery Channel*. Mengenai *Leverage Model*, di BPD DIY tidak terjadi, karena BPD DIY secara khusus sudah membentuk divisi khusus guna mempersiapkan *Spin – Off*.

Kata Kunci: Penghindaran Hukum, *Leverage Model*, *Spin – Off*.

Abstract

The purpose of this research is to find out how to implement Office Channeling and Delivery Channel in Conventional Commercial Banks. Then the implementation of the Leverage Model proposed in the Sharia Business Unit at BPD DIY Syariah. And whether the Leverage Model is classified as an effort to avoid law. The research method used is legal research that uses an empirical approach. This type of research is descriptive. Types and sources of data with interview data accompanied by relevant laws and regulations. Data collection methods in this research are by means of library research and interviews with Islamic banking actors in Islamic banking. The data analysis method of this research will be carried out in accordance with the laws and regulations, sharia principles, jurisprudence and doctrine which are combined with the results of data obtained from objects that are examined as a whole.

In getting results, the DIY Syariah BPD carried out the Office Channeling as set out in the legislation. Because BPD DIY Syariah is still a Sharia Business Unit (UUS). That is, BPD DIY Syariah does not implement Delivery Channel.

Regarding Leverage Model, BPD DIY does not occur, because BPD DIY has specifically formed a special division to prepare Spin-Off.

Keywords: *Legal Avoidance, Leverage Model, Spin-Off.*

1. PENDAHULUAN

Praktek masyarakat Islam dalam mengelola ekonomi¹ sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, sudah pernah tercatat dalam sejarah kejayaan Islam, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.² Kemudian, mulai hadir Bank.³ Namun, pada awal kemunculannya, Bank ini belum menggunakan prinsip Hukum Islam. Keresahan terhadap fenomena sistem yang jauh dari nilai Islam ini kemudian mendorong umat Islam dunia untuk menghadirkan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah.⁴ Kemudian, lahirlah Bank berprinsip Islam pertama pada tahun 1963 di Mesir yang terbukti dapat berkembang dengan baik. Bank yang berprinsip demikian kemudian diadopsi oleh beberapa negara termasuk Indonesia dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia. Konsep Bank ini, mendapat respon positif dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat Indonesia sehingga dapat berkembang dengan pesat.⁵ Hal ini mendorong Bank Umum Konvensional (BUK) yang melihat kebutuhan masyarakat terkait bank berprinsip Islam, mulai membuka unit khusus yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) guna mengakomodir

¹ Bambang Hermanto, 2014, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara (Anggota IKAPI), hal. 11.

² Ahmad Dahlan, 2012, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*, Yogyakarta : Teras, hal. 32.

³ Dwi Nuraini Ichsan, 2014, *Perbankan Umum dan Syariah*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, hal. 10.

⁴ Wardah Yuspin, 2016, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 2.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Keuddukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, hal. 192.

nasabah yang ingin bertransaksi berbasis Islam (syariah).⁶ Saat ini pun Perbankan Syariah dianggap untuk menyempurnakan Perbankan Konvensional. Karena posisi Perbankan Syariah termasuk dalam Perekonomian Nasional.⁷

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada Pasal 68. Pemerintah memerintahkan kewajiban bagi BUK yang memiliki UUS memisahkan diri dengan UUSnya. Yaitu dengan menjadikan UUS yang dimiliki menjadi Bank Umum Syariah (BUS) setelah memiliki nilai aset paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini (*Spin – Off*) dan akan ada sanksi bagi BUK yang tidak melakukan hal tersebut.⁸

Namun, hal yang terjadi di lapangan, bahwa niat baik dari pemerintah untuk mempermudah lalu lintas perekonomian di masyarakat untuk semakin mendapatkan kepastian hukum, yakni dengan mengatur peraturan perundang – undangan mengenai *Spin – Off*, tidak disambut dengan baik oleh para pelaku usaha di perbankan syariah. Terbukti muncul fenomena *Leverage Model*. *Leverage Model* merupakan penyaluran pembiayaan syariah melalui kantor cabang induk perusahaan.⁹ Artinya BUS akan menggunakan cabang milik Bank induknya yaitu Bank Umum Konvensional (BUK) untuk menawarkan produk – produk syariah mereka. Hal ini memiliki kemiripan dengan *Office Channeling*.

⁶ Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang : UIN – Malang Press (Anggoa IKAPI), hal. 29.

⁷ Wardah Yuspin, Kelik Wardiono, *Islamic Banking Trajectory of Indonesia: Dealing with the Present and Shaping the Future*, International Jurnal of Economic Research, Volume 14, Nomor 16 (Part 2), 2017, hal. 31.

⁸ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

⁹ Agutianto Mingka, 2013, *Leverage Model Bank Syariah* dalam www.agustiantocentre.com/?p=1237 diunduh Jumat 4 Mei 2018 pukul 09:48 WIB.

Hanya saja ini lebih luas, tidak hanya soal penghimpun dana, namun produk – produk lainnya yang menggunakan akad berbasis ketentuan syariah (layanan syariah). *Leverage Model* merupakan perbuatan penghindaran hukum karena menghindari sanksi dari tidak melaksanakannya *Spin – Off*. Dengan memanfaatkan keadaan belum ada aturan yang mengatur mengenai *Leverage Model* secara jelas.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek pelaksanaan *Office Channeling* dan *Delivery Channel* yang ada pada Bank Umum Konvensional? (2) Bagaimana pelaksanaan *Leverage Model* yang diusulkan pada Unit Usaha Syariah di BPD DIY Syariah? (3) Apakah *Leverage Model* dapat digolongkan sebagai upaya penghindaran hukum?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Office Channeling* dan *Delivery Channel* yang ada pada Bank Umum Konvensional. Kemudian pelaksanaan *Leverage Model* yang diusulkan pada Unit Usaha Syariah pada BPD DIY Syariah. Dan apakah *Leverage Model* tergolong sebagai upaya perbuatan penghindaran hukum.

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut: (1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bidang hukum perdata. (2) Memberikan analisis mengenai *Leverage Model* pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. (3) Mengembangkan dan membentuk pikir dinamis, dan menambah kemampuan penulis dalam merapkan keilmuan yang sudah diperoleh selama berkuliah. (4) Mengetahui permasalahan yang ada di sekitar masyarakat dan mengkaji untuk memberikan masukan solusi berupa pemikiran analisis tentang praktek *Leverage*

Model pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. (5) Memberikan wawasan pada masyarakat dan pelaku perbankan syariah. Dalam hal ini mengenai praktek *Leverage Model* pada Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan empiris. Jenis penelitian yang bersifat dekritif. Jenis dan sumber data dengan data wawancara disertai peraturan perundang – undangan terkait. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku perbankan syariah pada perbankan syariah. Metode analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan berpedoman ada peraturan perundang – undangan, prinsip syariah, yurisprudensi dan doktri yang dikombinasikan dengan hasil data yang diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan *Office Channeling* dan *Delivery Channel* pada Bank Konvensional

Office Channeling dilaksanakan oleh Unit Usaha Syariah dari suatu unit khusus yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional. Sehingga, pelaksanaan *Office Channeling* dilakukan oleh cabang bank konvensional yang satu induk dengan UUS tersebut. Dimana dalam hal sistem pembukuan, dilakukan dengan sistem pembukuan terpisah. Dengan kata lain, cabang BPD DIY dengan status masih memiliki UUS yakni BPD DIY Syariah dapat melaksanakan *Office Channeling*. Antara nasabah pada bank konvensional BPD DIY dan pada nasabah

UUS BPD DIY Syariah terpisah dalam hal sistem pembukuan. Dan hal ini dilakukan dengan sistem TI yang mumpuni sehingga bisa terjaga dengan baik pemisahan antara nasabah konvensional dengan nasabah syariah.

Pelaksanaannya dilakukan sebagaimana SOP yang telah dibuat oleh divisi khusus hukum yang kemudian diberlakukan di UUS mereka yakni BPD DIY Syariah dan gunakan pula oleh cabang BPD DIY yang melaksanakan layanan syariah. Fungsi dari SOP ini guna mempermudah para pelaksana layanan syariah dalam memahami aturan yang di atur oleh Pemerintah melalui peraturan perundang – undangan. Hal ini juga berguna untuk tidak menimbulkan multi tafsir diantara para pegawai pelaksana layanan syariah.

BPD DIY melaksanakan *Office Channeling* di cabang bank konvensional BPD DIY. Dengan cara pelaksanaan, cabang bank konvensional melakukan layanan syariah dan memasukkan data yang dilakukan dengan sistem pembukuan berbeda dengan nasabah konvensional. Yaitu adanya pemisahan *account* syariah dengan *account* konvensional.

Dalam pelaksanaan layanan syariah, BPD DIY pun dikontrol kesesuaiannya mengenai pelaksanaan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam perjalanan selama ini, BPD DIY Syariah tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran. Dan selalu memenuhi target yang ditargetkan oleh pusat. Sehingga kinerjanya tergolong dapat nilai yang memuaskan. Hal ini didukung juga oleh kinerja dari para pegawai pelaksana layanan syariah baik ketika di kantor BPD DIY Syariah maupun di konter cabang konvensional yang mematuhi peraturan yang diberlakukan.

Sedangkan untuk pelaksanaan *Delivery Channel*, merupakan layanan syariah yang dilakukan oleh BUS, sehingga tidak dilaksanakan oleh BPD DIY Syariah saat ini. karena BPD DIY Syariah masih berstatus Unit Usaha Syariah (UUS).

3.2 Sistem kebijakan *Leverage Model*

Pelaksanaan kebijakan *Leverage Model* pada BPD DIY Syariah terdapat perbedaan pendapat. Dimana disatu sisi dimaknai sebagai pembiayaan dan disisi lain dimaknai sebagai *Office Channeling* atau Layanan Syariah yakni sebagai bentuk dari adanya layanan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah pada kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional atas nama kantor cabang syariah (UUS) pada satu induk yang sama.

Dan pemahaman yang dipahami oleh pihak bank adalah sama antara *Leverage Model* dengan *Office Channeling*. Menurut hasil wawancara, *Leverage Model* yang ditawarkan disini sama dengan *Office Channeling*. Artinya, dikarenakan *Leverage Model* dipersamakan dengan *Office Channeling*, kemudian *Office Channeling* dipersamakan dengan Layanan Syariah (LS), maka penawaran yang di tawarkan adalah layanan terhadap penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor cabang pembantu (capem) atau cabang konvensional untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah BPD DIY Syariah.

Terjadi perbedaan mengenai makna *Leverage Model* ini merupakan hal yang wajar. Karena belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai makna dan pelaksanaan dari *Leverage Model* ini. Namun pada dasarnya *Leverage Model*

dilakukan sebagai upaya penghindaran dari terlaksananya *Spin – Off* yang harus dilakukan oleh UUS yang telah memenuhi syarat. Yakni nilai aset mencapai 50% atau setelah 15 tahun UUPS berlaku.

3.3. Penghindaran Hukum

Menurut kamus hukum, yang dimaksud dengan Penghindaran Hukum adalah sebuah pelarian dari konsekuensi dari tindakan tertentu melalui penggunaan sarana yang dapat diterima secara hukum.

BPD DIY dalam melaksanakan pelayanan jasa berdasarkan Prinsip Syariah untuk dan atas nama BPD DIY Syariah selalu merujuk pada SOP yang sudah ditentukan dan sama dengan SOP yang dijalani di BPD DIY Syariah. Secara berkala selalu mendapatkan kontrol dari Pengawas mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah di SOP.

SOP yang diberlakukan merupakan turunan pelaksanaan dari arahan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan dilaksanakan layanan syariah oleh cabang bank konvensional yang sesuai dengan SOP, menunjukkan tidak adanya perilaku sebagai bentuk dari penghindaran hukum. Bahkan untuk menuju *Spin – Off* BPD DIY pun saat ini sudah memiliki divisi khusus yang sengaja dibentuk untuk mengurus mengenai persiapan *Spin – Off*.

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa BPD DIY tidak memiliki niatan adanya perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menghindari terjadinya *Spin – Off*. Maka tidak ada penghindaran hukum yang dilakukan oleh BPD DIY.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di Bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa:

BPD DIY Syariah melaksanakan *Office Channeling* sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang – undangan. Karena BPD DIY Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Namun, BPD DIY Syariah tidak menerapkan *Delivery Channel*, karena saat ini BPD DIY Syariah masih berbentuk sebagai UUS belum sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Mengenai praktek *Leverage model* adalah sebuah kebijakan, dimana para nasabah melalui cabang bank konvensional dapat memilih untuk dilayani dengan layanan syariah. Sistem ini mirip dengan layanan syariah yang kadang disebut dengan *Office Channeling*. Hanya saja, pada *Office Channeling* terbatas pada penghimpunan dana (*funding*). Sedangkan dengan *leverage model*, bank konvensional dapat menyalurkan pembiayaan syariah dengan menggunakan akad-akad syariah dan ketentuan syariah telah terjadi di BPD DIY Syariah. Namun, Bila yang dimaksud bahwa praktek *Leverage Model* sebagai kebijakan untuk menghindari pasal 68 Undang - Undang Perbankan Syariah, maka untuk saat ini BPD DIY Syariah tidak menawarkan hal tersebut.. Bahkan tidak berencana untuk memberikan layanan tersebut kedepannya. Karena pihak BPD Syariah pada saat ini tengah mempersiapkan proses unit syariahnya dengan devisi khusus untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan *Spin - Off*.

Apabila *Leverage Model* itu dijadikan salah satu pilihan untuk menghindari pasal 68 UUPS maka akan banyak aturan yang dilanggar. Sehingga meskipun *Leverage Model* ini bentuk alternatif yang dapat digunakan sebagai

alternatif penghindaran pasal 68 UUPS, tapi BPD DIY Syariah tidak melakukan hal tersebut.

4.2 Saran

Melihat perkembangan Perbankan Syariah yang cukup diminati oleh masyarakat, membuat Perbankan Konvensional mulai memperhatikan kebutuhan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Perbankan Konvensional adalah dengan cara memfasilitasi masyarakat yakni menghadirkan Unit Usaha Syariah (UUS). Kehadiran UUS oleh perbankan konvensional sebagai induknya ini, cukup memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan adanya layanan syariah. Terlebih setelah hadir peraturan yang mengatur mengenai *Office Channeling* dan *Delivery Channel*. Hanya saja, pengetahuan masyarakat mengenai adanya dua layanan ini tidak merata. Masih banyak masyarakat tidak mengerti adanya dua sistem tersebut. sehingga, saran Penulis untuk kebijakan tersebut adalah adanya pemberitahuan kepada masyarakat lebih masif.

Untuk pemberlakuan *Spin – Off* dengan di berlakukannya pasal 68 UUPS, dirasa masih butuh pengkajian lebih dalam mengenai efektifitas dan efisiensinya. Karena perkembangan ekonomi Indonesia dalam perbankan syariah cukup signifikan maka langkah dalam pengembangannya perlu langkah yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Sadi Is, 2015, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, Malang: Setara Press.

Bambang Hermanto, 2014, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara (Anggota IKAPI).

Ahmad Dahlan, 2012, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*, Yogyakarta : Teras.

Dwi Nuraini Ichsan, 2014, *Perbankan Umum dan Syariah*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam dan Keuddukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Jundiani, 2009, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang : UIN – Malang Press (Anggoa IKAPI).

Wardah Yuspin, 2016, *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal:

Wardah Yuspin, Kelik Wardiono, *Islamic Banking Trajectory of Indonesia: Dealing with the Present and Shaping the Future*, International Journal of Economic Research, Volume 14, Nomor 16 (Part 2), 2017.

Peraturan Prundang – undangan

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Internet

Agutianto Mingka, 2013, *Leverage Model Bank Syariah* dalam www.agustiantocentre.com/?p=1237 diunduh Jumat 4 Mei 2018 pukul 09:48 WIB.